



Pola Pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Lingsar Kabupaten Lombok Barat

Bohari^{1*}, Asrin¹

¹ Program Studi Magister Administrasi Pendidikan, Pascasarjana, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

DOI: [10.29303/jpap.v8i1.569](https://doi.org/10.29303/jpap.v8i1.569)

Sitasi: Bohari, B., & Asrin, A. Pola Pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Lingsar Kabupaten Lombok Barat. (*JPAP*) *Jurnal Praktisi Administrasi Pendidikan*, 8(1), 16–20. <https://doi.org/10.29303/jpap.v8i1.569>

*Corresponding Author:

Bohari, Program Studi Magister
Administrasi Pendidikan,
Pascasarjana, Universitas Mataram,
Mataram, Indonesia, Emai:
bukhoryalgin@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 1 Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam pengelolaan Dana Operasional Sekolah terdapat beberapa tahapan dan proses yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pola pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menggunakan pola alternatif lebih cenderung dipersepsi positif dalam upaya menerapkan prinsip transparan dan akuntabilitas, karena semua guru mempunyai kesempatan ikut terlibat dalam pengelolaan Dana BOS tersebut, pengelolaan dana bos sudah berjalan cukup baik karena adanya perencanaan dengan penyusunan RKAS yang melibatkan semua unsur baik Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah, kesesuaian aturan dan petunjuk teknis penggunaan dan pelaksanaan dana BOS dengan realisasinya, serta pelaksanaan pengawasan oleh kepala sekolah dan pelaporan pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS kepada Sekolah, kota/kabupaten dan pemerintah pusat yang tepat waktu. Ini menunjukkan bahwa sekolah telah melaksanakan proses pengelolaan Dana BOS sesuai dengan aturan pemerintah atau petunjuk teknis dalam pengelolaannya.

Kata Kunci: Manajemen, Pelaksanaan, Dana BOS.

Pendahuluan

Pemberian pendidikan melalui bimbingan dan dukungan dimaksudkan untuk membantu siswa tumbuh menjadi dewasa dan memenuhi tanggung jawab akademiknya secara mandiri, tanpa bantuan pihak luar (Purnomo, 2019). Pendanaan selalu menjadi permasalahan bagi lembaga pendidikan. Pendanaan merupakan permasalahan utama dalam pengelolaan pendidikan dan memerlukan perhatian serta pertimbangan khusus kepada pengelola (Alfian, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dana (BOS) merupakan dana yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan non-personalia sekolah dasar dan menengah untuk melaksanakan rencana wajib belajar.

Bantuan Operasional Sekolah yang diberikan pada setiap sekolah merupakan suatu usaha pemerintah dalam mengembangkan derajat pendidikan, yang mana biayanya secara langsung diberikan kepada pihak sekolah untuk diatur sesuai dengan kebutuhan dengan berdasar pada juknis yang

telah ditentukan pemerintah. Juknisnya berbunyi bahwa penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS yang dibuat mengharapakan bahwa pengelolaan dana BOS bisa tepat sasaran.

Melalui pengelolaan keuangan sekolah, kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dicatat secara transparan, serta dipakai untuk membiayai pelaksanaan program sekolah (Alfian, 2021). Berdasarkan Departemen Pendidikan Nasional atau biasa disingkat Depdiknas pengelolaan keuangan adalah tindakan pengelolaan atau ketatausahaan keuangan diantaranya yaitu pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta pelaporan (Depdiknas, 2000). Pengelolaan keuangan sekolah termasuk Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Sidoarjo bukan hanya terkait tentang kegiatan dalam mengelola ketatausahaan sekolah saja, akan tetapi menyangkut semua kegiatan yang terjadi disekolah, baik itu substansi, personalia, perencanaan, kerjasama, kepemimpinan, kurikulum dan lainnya. Tanpa adanya pengelolaan keuangan yang baik, sulit bagi sekolah untuk tujuan pendidikan yang seharusnya dapat dicapai sekolah. Biaya sekolah yang terkelola dengan baik akan mampu memaksimalkan fasilitas pendidikan kepada siswa murid, wali murid, masyarakat dan lainnya. Karena baik dan buruknya dalam mengelola finansial sekolah akan berpengaruh pada kualitas layanan pendidikan (Sudirman, Asri, Rokhmat, 2021).

Berdasarkan hasil observasi penelitian terhadap Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bernaung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat berjumlah 42 Sekolah Menengah Pertama (SMP), semuanya telah mendapatkan kucuran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dari 42 Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut, peneliti mengambil SMP Negeri 1 Lingsar sebagai sampel penelitian dikarenakan Sekolah tersebut adalah sekolah yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai sekolah terbaik dalam pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS). Meskipun beberapa Sekolah lainnya rata-rata sudah melibatkan komite sekolah dan guru dalam penyusunan RKAS terbukti terlihat pada SK Tim BOS yang ada di sekolah. Akan tetapi sekolah tersebut dalam pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih mendapatkan kendala terutama dalam hal pengelolaannya.

Dari data awal observasi dengan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ada beberapa permasalahan yang menjadi kendala sehingga dalam pengelolaan masih belum efektif, akuntabilitas, dan transparan. Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di beberapa Sekolah

Menengah Pertama (SMP) masih kurang baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemeriksaan, masih adanya perbedaan antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya yang ada di beberapa sekolah di kabupaten Lombok Barat. Dengan adanya jumlah siswa yang cukup banyak dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang baik akan mampu mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Beberapa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Masih belum sesuai dari yang diharapkan dikarenakan masih belum maksimal mengikuti pedoman petunjuk teknis pengelolaan dana BOS dan mungkin pula disebabkan oleh kurangnya komunikasi antar sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Adapun faktor lain yaitu masih terbatasnya kemampuan dan skill dari bendahara dan operator sekolah dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pelaporannya, terutama Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada di pelosok.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah Deskriptif kualitatif, yang merupakan suatu metode penelitian yang bergerak pada pendekatan kualitatif sederhana dengan alur induktif (Yuliani, 2018). Sehingga peneliti menggunakan metode penelitian Deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus digunakan sebagai strategi untuk mencermati suatu obyek, peristiwa, proses, aktivitas maupun kelompok individu (Yusianto, 2020).

Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, bendahara BOS, guru, operator sekolah, komite sekolah dan wali murid yang tergabung dalam tim BOS SDN 1 Batu Mekar. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data yang dikemukakan oleh Miles and Huberman (2014), yaitu *data collection* (pengumpulan data), *data reduction* (reduksi data), *data display* (Penyajian data), dan *conclusion drawing/verification*.

Hasil dan Pembahasan

Proses pengawasan dan evaluasi dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 1 Lingsar merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan dana BOS. Kegiatan

pengawasan terkadang menjadi permasalahan bagi sekolah sebagai pengelolaan dana, karena proses pemeriksaan kadang dilakukan secara mendadak tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan tingkat kesiapan sekolah dalam kegiatan auditing relatif berbeda antara sekolah satu dengan sekolah lainnya. Dalam petunjuk teknis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dinyatakan bahwa monitoring dan evaluasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan secara internal dan eksternal. Senada dengan uraian diatas kepala sekolah memberikan pernyataan bahwa:

“pengawasan dan evaluasi penggunaan dan pertanggung jawaban dana BOS dilakukan dengan baik oleh pengelola dana BOS sekolah, Tim pengelola BOS Kabupaten di Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat dan oleh Inspektorat. Teknis evaluasi tersebut dilakukan dengan cara pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan secara periodik dan berkesinambungan, baik evaluasi secara internal oleh pihak pengelola dana BOS dalam hal ini kepala sekolah dan bendahara BOS, juga dilakukan pemeriksaan secara eksternal oleh instansi vertikal di atasnya dalam hal ini Tim Manajemen dana BOS Kabupaten, Inspektorat. Evaluasi dan pengawasan tersebut dilakukan tentunya sesuai periode anggaran dan aturan serta kewenangannya masing-masing, agar tidak tumpang tindih dan menyalahi aturan. Kami disini sifatnya saling melengkapi, artinya antara kepala sekolah dengan bendahara saling mengingatkan akan hal yang tidak boleh dilakukan dalam upaya penggunaan dana BOS ini. Saya selaku kepala sekolah selalu memantau kondisi keuangan mulai awal pencairan, perbulan dan pertahap. Melihat bagaimana laporan dibuat oleh tim dan memastikan pajak terbayar pengawasan internal dalam bentuk ini terus saya lakukan sehingga Alhamdulillah pada saat pemeriksaan tidak ada temuan tetapi jika ada temuan maka akan ditindak lanjuti” (Hasil wawancara dengan Bapak Kaharudin, Kepala Sekolah).

Dari hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi tahapan pengawasan internal yang diterapkan oleh sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 1 Lingsar Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut:

1. Perumusan program pengawasan dan evaluasi untuk memastikan apakah pengelolaan sudah mematuhi aturan dan prosedur
2. Menentukan periode pengawasan dan evaluasi aktivitas pengeluaran kas dana BOS pada periode tertentu
3. Mengidentifikasi resiko yang akan terjadi.
4. Program pengawasan dan evaluasi mulai dari proses pengadaan, perencanaan, penerimaan barang/jasa, dan pembayaran.

5. Melakukan pembinaan jika menemukan indikasi kesalahan dalam penggunaan dana.
6. Pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut.

Petunjuk pengawasan dan evaluasi program, bertujuan untuk bahan pembelajaran dan informasi bagi pengambil keputusan dalam rangka penyempurnaan program memotivasi semangat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program (Ayu et al., 2021).

Dalam pengawasan dan evaluasi akan diperoleh bukti secara objektif tentang suatu kejadian ekonomi dengan tujuan supaya ada kesesuaian antara pernyataan dan pedoman yang ditetapkan dalam pengelolaan keuangan, serta hasilnya dapat dipergunakan oleh pihak yang berkepentingan. Menjelaskan dan mempertimbangkan kepada orang lain tentang tindakan dan keputusan yang diambil dan suatu performan yang cocok dan meminta pertimbangan kepada orang lain.

Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang merupakan program pemerintah telah dilakukan secara terbuka oleh Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Dengan demikian, dapat diaudit oleh seluruh komponen masyarakat agar pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Kepala sekolah memiliki pengawasan yang melekat untuk mengawasi seluruh program dan pengelolaan anggaran yang ada di sekolah selain itu juga tim pengawas yang telah ditunjuk dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Lingsar Kabupaten Lombok Barat telah dipersiapkan untuk setiap tahap pencairan dana pada tahun anggaran berjalan. Hal ini dilakukan untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan. Kesiapan ini untuk menjaga kemungkinan jika kedatangan auditor dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun Inspektorat Kabupaten Lombok Barat yang sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu, karena auditor sering turun ke sekolah-sekolah tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Oleh sebab itu, sekolah harus siap dan bersedia jika sewaktu-waktu tim auditor datang ke sekolah untuk melakukan pemeriksaan keuangan sekolah. Pola pengawasan yang diterapkan seperti ini sejalan dengan pandangan Irawan Soejito (1983) yang sering disebut dengan pengawasan preventif dan refresif artinya pengawasan yang dilakukan lebih kearah mencegah jangan sampai kegiatan pengelolaan dana terjerumus pada kesalahan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengawasan refresif artinya pengawasan

yang berupa penangguhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah yang dinilai bertentangan dengan kondisi dan kepentingan umum.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Lingsar Kabupaten Lombok Barat terkait kegiatan monitoring dan evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan oleh auditor menyebutkan bahwa pemeriksaan, pengawasan dan evaluasi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Lingsar Kabupaten Lombok Barat sudah sering dilaksanakan di sekolah tersebut, tahun 2019 sekolah ini sudah diaudit oleh BPKP, kemudian tahun 2021 oleh Inspektorat Daerah. Selain itu, masih ada tim evaluasi dari Pengawas TK/SD, bahkan dari Dewan Pendidikan yang melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dari hasil pengawasan dan evaluasi oleh tim auditor diperoleh bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Lingsar Kabupaten Lombok Barat dinyatakan tidak ada temuan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sekolah telah menunjukkan jumlah siswa yang dimiliki dan kesesuaian jumlah dana yang diterima di rekening dan penggunaan untuk beberapa komponen. Pada waktu monitoring dan evaluasi sekolah menyiapkan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS), laporan penggunaan dana, buku kas umum, buku pajak, dan dokumen data kegiatan sekolah yang telah dilaksanakan, dan peralatan pendukung yang dibiayai dari dana tersebut jika diperlukan, bahkan komite diminta siap jika ada yang dibutuhkan untuk konfirmasi. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Lingsar Kabupaten Lombok Barat dalam mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilaksanakan secara terbuka, maka sekolah tidak merasa keberatan untuk menunjukkan catatan dan laporan tentang penggunaan dana tersebut. Sekolah sudah mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan prinsip keterbukaan dan prinsip kejujuran.

Lembaga pemerintah dalam mengaudit dan mengawasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah dengan tujuan dan harapan agar sekolah mematuhi aturan penggunaan dana sesuai dengan petunjuk dan teknis (juknis) yang ada sehingga hasilnya sesuai dengan maksud dan tujuan pemerintah memberikan bantuan dana tersebut. Karena letak sekolah yang berada di pusat kota kecamatan dan pinggir jalan raya cukup memudahkan untuk dikunjungi oleh lembaga auditor sehingga berdampak positif untuk menekan penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Selama proses kegiatan penelitian yang dilakukan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Lingsar Kabupaten Lombok Barat terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan kembali pelaksanaannya diantaranya masalah sosialisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sosialisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum dilakukan secara maksimal, semua orang tua/wali murid harus diundang pada rapat komite, pada saat diadakan rapat sosialisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pihak sekolah harus membuat notulen rapat karena notulen rapat ini memiliki fungsi informatif, dokumentatif, dan sebagai bahan pertanggungjawaban. Hal ini merupakan salah satu bentuk prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pada saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Lingsar Kabupaten Lombok Barat melalui rapat guru, komite, dan orang tua/wali murid peserta yang hadir masih rendah atau sedikit bila dibandingkan dengan jumlah siswa. Selama tiga kali diadakan rapat oleh sekolah kurang dari 50 persen peserta yang hadir. Hal ini disebabkan oleh kurangnya rasa kepedulian terhadap sekolah, seharusnya kegiatan sosialisasi ini diintensifkan pelaksanaannya oleh sekolah agar orang tua/wali murid, guru, dan komite sekolah saling memegang prinsip keterbukaan. Sementara kegiatan-kegiatan lain seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan anggaran, dan pemeriksaan sudah berjalan dengan baik sesuai rencana yang telah diprogramkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). Proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan anggaran, dan pengawasan yang berkaitan dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah berjalan dengan baik dan mendapat apresiasi dari pihak inspektorat Kabupaten Lombok Barat, hal-hal seperti ini harus dipertahankan bahkan harus ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya.

Kesimpulan

Proses pengawasan dan evaluasi maupun implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Lingsar Kabupaten Lombok Barat diaudit oleh auditor eksternal maupun internal dengan hasil tidak ada temuan atau penyimpangan semua pengelolaan sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Jadi, pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai dari pola perencanaan (*planning*), pola pengorganisasi (*organizing*), pola pelaksanaan (*Actuating*) sampai pola pengawasan dan evaluasi

(*Controlling*) yang di lakukan dengan proses dan tahapan yang sesuai dengan petunjuk dan teknis pengelolaan sehingga hasilnya berjalan dengan baik berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif

Daftar Pustaka

- Ayu, H. C., Ferdian, T., & Nelvia, R. (2021). Pengaruh partisipasi masyarakat, transparansi pemerintahan dan akuntabilitas publik terhadap efisiensi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kecamatan Rimbo Ulu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1).
- Hidayat, R., & Suryono, A. (2014). Implementasi kebijakan penggunaan dana bos dan laporan keuangan BOS. *Reformasi*, 4(1).
- Sudirman, S., Asrin, A., & Rokhmat, J. (2021). Pengaruh Keadilan Organisasi terhadap Kinerja Tenaga Kependidikan. (*JPAP*) *Jurnal Praktisi Administrasi Pendidikan*, 5(1), 1-5.
- Purnomo, H. (2019). Psikologi pendidikan. Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Alfiani, M. (2021). Komparasi Pengelolaan Dana Bos Sebelum Dan Pada Saat Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(3), 1927-1941.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, (2021).
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
- Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *Quanta*, 2(2), 83-91.
- Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of scientific communication (jsc)*, 1(1).
- Miles, matthew B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data Analysis "a methods sourcebook."* United States of Amerika: SAGE Publications.
- Soejito, I. (1983). Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah/oleh Irawan Soejito.